

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG

KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

b. bahwa untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik kedua negara, demi meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara;

c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama pengembangan di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Cooperative Activities in the Field of Defence*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Cooperative Activities in the Field of Defence*) dengan Undang-Undang;

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . . .

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Cooperative Activities in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2011 di Dili yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Tetum, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 47

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG
KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik kedua negara, demi meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Kerja sama di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste diwujudkan dalam bentuk Persetujuan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste yang telah ditandatangani di Dili pada tanggal 19 Agustus 2011 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Beberapa . . .

Beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste adalah:

1. Kerja sama dalam bidang pertahanan ini, meliputi: dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerja sama Angkatan Bersenjata, kerja sama dukungan logistik, kerja sama di bidang lain yang disepakati bersama oleh Kedua Pihak.
2. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama Bidang Pertahanan.
3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, peralatan, dokumen, dan bahan yang bersifat rahasia.
4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5672



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
TENTANG AKTIFITAS KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak" atau "Pihak-Pihak";

Bertujuan pada pengembangan hubungan persahabatan antara kedua Negara;

Mengingat kepentingan bersama mereka dalam mempromosikan kerjasama di bidang pertahanan;

Mengakui bahwa kerjasama yang lebih erat di bidang ini akan bermanfaat bagi kedua belah Pihak;

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperluas hubungan bilateral yang ada melalui kerjasama pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial;

Berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing.

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL I

TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang pertahanan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing untuk tujuan damai seperti yang diabadikan dalam Piagam PBB dan norma-norma universal lainnya yang diakui hukum internasional.

PASAL II

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama di bidang pertahanan yang dicakup oleh Persetujuan ini, termasuk dalam bentuk sebagai berikut:

1. Dialog dan Konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama.
2. Pertukaran informasi dalam bidang pertahanan dan hal-hal lain.
3. Meningkatkan kerja sama Angkatan Bersenjata.
4. Kerjasama dukungan logistik.
5. kerjasama di bidang-bidang lain yang disepakati bersama oleh kedua Pihak.

PASAL III

PENGATURAN PELAKSANAAN

Para Pihak dapat membuat pengaturan pelaksanaan berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari kerja sama ini, apabila diperlukan.

PASAL IV

KOMITE BERSAMA

1. Komite Bersama Bidang Pertahanan Indonesia - RDTL selanjutnya disebut sebagai "Komite Bersama" dibentuk untuk tujuan memulai, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan

dalam rangka Persetujuan ini. Komite Bersama akan membahas berbagai isu kerjasama ini.

2. Komite Bersama terdiri dari perwakilan resmi dari masing-masing Pihak. Pertemuan Komite Bersama diketuai oleh pejabat pertahanan senior dari masing-masing Pihak.
3. Komite Bersama dapat membentuk sub-komite untuk secara efektif menangani proyek-proyek tertentu yang menjadi kepentingan bersama.
4. Komite bersama pada prinsipnya akan menyelenggarakan pertemuan sekali dalam dua tahun, secara bergantian di Indonesia dan Timor-Leste, dengan tanggal, tempat dan agenda pertemuan yang disepakati oleh Ketua Bersama.
5. Tugas Komite Bersama adalah:
 - a) Untuk mengidentifikasi area kerja sama yang potensial di bidang pertahanan;
 - b) Untuk maksud dan membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;
 - c) Untuk memulai dan mengatur aktivitas kerjasama;
 - d) Untuk memonitor dan meninjau kegiatan lainnya dalam rangka Persetujuan ini;
 - e) Untuk merekomendasikan pengaturan pelaksanaan, jika dan ketika diperlukan;
 - f) Untuk mengusulkan dan mempertimbangkan kemungkinan amandemen atas Persetujuan ini.

PASAL V

PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang terkait perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk kepemilikan, penggunaan hukum (yang sedang ditransfer atau dibuat sesuai dengan Persetujuan ini), dan perlindungan Pihak ketiga atas hak-hak yang sah diatur dengan pengaturan yang terpisah oleh Badan-badan dari Pihak pada area kerjasama yang ditentukan.

PASAL VI

ALOKASI ANGGARAN

Masing-masing Pihak akan menanggung biaya masing-masing dalam pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya.

PASAL VII

YURISDIKSI DAN KLAIM

1. Pihak-Pihak berwenang dari masing-masing Pihak memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksinya atas personel militer yang berkunjung dan/atau komponen sipil berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam wilayah masing-masing pihak.
2. Para Pihak akan melepaskan setiap dan semua klaim, selain klaim kontrak, terhadap satu sama lain atas kerusakan, kehilangan atau kerusakan harta benda milik Angkatan Bersenjata atau cedera atau kematian personel militer yang berkunjung dan/ atau personel sipil sebagai akibat dari kinerja tugas resmi mereka.
3. Klaim oleh Pihak ketiga yang timbul atas tindakan atau kelalaian oleh personel militer dan personil sipil Pemerintah masing-masing Pihak harus diselesaikan sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak.

PASAL VIII

KERAHASIAAN

Dalam pelaksanaan Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste, aturan berikut akan berlaku:

1. Para Pihak berkomitmen untuk melindungi informasi rahasia yang mereka mungkin memiliki akses dalam rangka Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.
2. Informasi rahasia dan peralatan hanya akan diberikan melalui saluran resmi atau oleh saluran yang disepakati oleh badan keamanan yang ditunjuk dari Para Pihak. Informasi ini dan peralatan diberi label dengan indikasi tingkat kerahasiaan dan Negara asal sebagai berikut:

INDONESIA	TETUM	INGGRIS	PORTUGIS
Sangat rahasia	Sekretu Liu	Top secret	Muito Secreto
Rahasia	Sekretu	Secret	Secreto
Konfidensial	Konfidensial	Confidential	Confidencial
Terbatas	Rezervadu	Restricted	Reservado
Biasa	La'os Klasifikadu	Unclassified	Não Classificado

3. Seluruh informasi yang diterima dalam rangka Persetujuan ini tidak dapat dipindahkan, diumumkan atau disebarluaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, sementara atau bersifat tetap, kepada Pihak Ketiga atau orang yang tidak berkepentingan dan entitas tanpa persetujuan tertulis dari Pihak asal informasi.

PASAL IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dari Persetujuan ini terkait penafsiran, penerapan atau implementasinya, akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Bersama untuk penyelesaian secara damai.
2. Dalam hal sengketa tidak diselesaikan di tingkat Komisi Bersama, Kedua Ketua Komite Bersama akan membawa hal tersebut kepada Menteri Pertahanan masing-masing untuk penyelesaian secara damai.
3. Dalam hal sengketa tersebut tidak diselesaikan berdasarkan ayat 2, maka harus diselesaikan oleh para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL X

PEMBERLAKUAN, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan kedua yang mana Para Pihak akan berkomunikasi secara resmi atas selesainya prosedur ratifikasi masing-masing dan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun. Kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan ayat 3 dari artikel ini, maka harus dianggap telah diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) tahun berikutnya.

2. Hal ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis antara para Pihak.
3. Hal ini dapat mencela setiap saat dengan salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dalam seratus delapan puluh (180) hari.
4. Pengakhiran ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu dari kontrak-kontrak yang sedang berlangsung dalam kerangka Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, Perwakilan bawah ini, dalam kewenangan pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Dili pada tanggal 19 Agustus 2011 dalam rangkap dua asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Tetum, Portugis dan Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



**PURNOMO YUSGANTORO
MENTERI PERTAHANAN**

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR LESTE**



**KAY RALA XANANA GUSMÃO
MENTERI PERTAHANAN DAN
KEAMANAN**



REPUBLIK INDONESIA

AKORDU

ENTRE

GOVERNUN REPÚBLIKA INDONÉZIA

HO

GOVERNUN REPÚBLIKA DEMOKRÁTICA TIMOR-LESTE

KONA-BA ATIVIDADE KOOPERASAUN IHA ÁREA DEFEZA

Governu Repúblika Indonézia ho Governu Repúblika Demokrátika Timor-Leste, hosi ne'e ba oin referidu nu'udar "Parte" ka "Parte sira" ;

Ho objetivu atu dezemvolve relasaun amizade entre rai rua ne'e;

Konsidera sira-nia interese komún atu promove kooperasaun iha área defeza;

Rekoñese katak kooperasaun ne'ebé besik liután iha área hirak ne'e sei fó benefísiu ba Parte rua hotu;

Hakarak atu aumenta no halo luan relasaun bilaterál ne'ebé eziste daudaun liuhosi kooperasaun defeza entre rai rua ne'e bazeadu ba prinsípiu igualdade, benefísiu mútuu no respeito tomak ba direitu soberania no integridade territoriál;

Tuir lei no regulamentu sira ne'ebé vigora iha rai ida-ida nian.

Konkorda ona buat hirak tuirmai ne'e:

ARTIGU I OBJETIVU

Akordu ne'e nia objetivu atu promove kooperasaun bilaterál iha área defeza tuir lei no regulamentu nasionál ida-idak nian ba objetivu dame nian hanesan fó sai iha Karta Nasoins Unidas nian no norma sira selseluk tan lei internasionál nian ne'ebé rekoñesidu universalmente.

ARTIGU II ÁMBITU KOOPERASAUN

Kooperasaun iha área defeza ne'ebé mak tama ba iha ámbitu Akordu ne'e nian, bele inklui forma hirak tuirmai ne'e:

1. Diálogo bilaterál regulár no konsulta kona-ba asuntu sira ne'ebé estratéziku kona-ba Defeza no Militar nian, ne'ebé mak sai nu'udar interesse komún;
2. Troka informasaun kona-ba estabelesimentu no kestaun sira defeza nian;
3. Promove kooperasaun Forsa Armada nian;
4. Kooperasaun kona-ba apoiu lojístiku;
5. Área kooperasaun selseluk tan ne'ebé mak Parte rua ne'e konkorda hamutuk.

ARTIGU III MEKANIZMU IMPLEMENTASAUN NIAN

Parte sira sei halo mekanizmu implementasaun partikulár ruma kona-ba aspetu espesífiku kooperasaun ne'e nian, karik nesesáriu.

ARTIGU IV KOMITÉ KONJUNTU

1. Komité Konjuntu defeza Indonézia-RDTL nian ida, hosi ne'e ba oin referidu nu'udar "Komité Konjuntu". Sei forma Komité Konjuntu ne'e ho objetivu atu hamosu iniciativa, koordena no monitoriza atividade oioin ne'ebé hala'o iha kuadru Akordu ne'e nian. Komité Konjuntu ne'e sei diskute asuntu oioin kooperasaun ne'e nian.

2. Komité Konjuntu ne'e sei kompostu hosi representante ofisiál sira hosi Parte ida-idak nian. Ofisiál defeza nível aas sira ne'ebé apropiadu hosi Parte sira ne'e mak sei lidera hamutuk enkontru Komité Konjuntu ne'e nian.

3. Komité Konjuntu ne'e bele estabelese subkomité hodi efetivamente tau atensaun ba projetu espesífiku sira ne'ebé iha interesse mútuu.

4. Komité Konjuntu sei halo enkontru em prinsípiu, dala ida iha tinan rua nia laran, alternadamente iha Indonézia no Timor-Leste. Ema sira ne'ebé lidera hamutuk Komité Konjuntu ne'e mak sei aprova data, fatin no agenda.

5. Komité Konjuntu nia knaar mak:

a) Atu identifika área potenciál sira kona-ba kooperasaun iha área defeza;

b) Atu propoin no diskute kestaun interesse komún nian;

c) Atu hamosu iniciativa no organiza atividade kooperasaun nian;

d) Atu monitoriza no halo revizaun ba atividade oioin ne'ebé hahú ona iha kuadru Akordu ne'e nian;

e) Atu rekomenda mekanizmu implementasaun nian, karik no bainhira nesesáriu;

f) Atu propoin no halo konsiderasaun kona-ba possibilidade alterasaun iha Akordu ne'e.

ARTIGU V PROTESAUN DIREITU PROPRIEDADE INTELEKTUÁL

Asuntu sira kona-ba protesausun direitu propriedade intelektuál inklui ninia titularidade (inglés: *ownership*), uzu legál (ne'ebé transferidu ka hamosu tuir Akordu ne'e), no mekanizmu seluk ne'ebé organizasaun sira Parte sira-ne'e nian konklui kona-ba área kooperasaun espesífika mak sei regula kona-ba protesausun ba terseira Parte sira-nia direitu lejítimu.

ARTIGU VI ALOKASAUN ORSAMENTU

Parte ida-idak sei iha responsabilidade ba ninia despeza rasik durante implementasaun Akordu ida ne'e tuir ninia alokasaun orsamentu.

JURISDISAUN NO REIVINDIKASAUN ARTIGU VII

1. Autoridades sira husi parte ida-idak nian iha poder atu ezerse jurisdisaun própria ba ema militar sira nebe vizita no/ou konponente civil hodi respeitu ofensas krimi nebe komite iha teritóriu parte ida-idak nian;
2. Parte sira sei renunsia tiha buat hotu nomos reivindikasoos, exepsaun ba litíjiu kontratuais nian, ne'ebé ida kontra ida seluk bainhira halo aat sasan ruma, halakon ou halo aat ba propriedade ne'ebé pertense Forças Armadas nian ou hakanek ou hamate ba sira nia pesoal militar ne'ebé mai no/ou pesoal civil nebe mosu durante hala'o sira nia kna'ar.
3. Reklamasauun ruma ne'ebé mai husi terceira parte ne'ebé husi sira nia hahalok ou omisoos ne'ebé mai husi pessoal militar ruma nomos relasiona ba pesoal husi membru Guvernu ba parte rua nian sei rezolve tuir leis no regulamentu ida-idak nian.

ARTIGU VIII KONFIDENCIALIDADE

Durante vijénsia akordu entre Republika Demokratika Timor-Leste ho Guvernu Republika Indonesia nee, sei aplika regras hirak hanesan tuir mai:

1. Partes sira kompromete atu proteje informasaun segredu nebe dalaruma sira bele asesu iha âmbito ba akordu ida ne'e tuir Leis nomos regulamentus nasionais ida-idak nian.
2. Informasaun hirak nebe **segredu** ho ekipamentus só fornese de'it liu husi kanais ofisiais ou kanais nebe akordadus husi ajensia seguransa nebe designada husi Partes sira. Informasaun hirak ne'e nomos ekipamentus sei tautan rótulu ho indikasaun nível konfidencialidade no ba Estadu orijem hanesan tuir mai:

INDONESIA	TETUM	INGLÊS	PORTUGUES
Sangat rahasia	Sekretu Liu	Top secret	Muito Secreto
Rahasia	Sekretu	Secret	Secreto
Konfidensial	Konfidensial	Confidential	Confidencial
Terbatas	Rezervadu	Restricted	Restrito
Biasa	La'os Klasifikadu	Unclassified	Não Classificado

3. Informasaun hotu-hotu ne'ebé simu iha ambitu ba Akordu ida ne'e sei la transferidu, publikadu, **direta ou indireta**mente, temporariu ou permanentemente, ba terseira parte ou ba ema sira nebe la hetan

autorizada molok hetan konsentimentu hakerek husi Parte orijen nebe fo informasaun.

ARTIGU IX SOLUSAUN BA KONTROVÉRSIAS RUMA

1. Kualker kontrovérsia ne'ebé mosu husi Akordu ida ne'ebé relasiona ho interpretasaun, aplikasaun ou iha ninia implementasaun, iha primeira oportunidade sei ható'o ba Komite Konjunta atu resolve ho dame.
2. Bainhira kontrovérsia ruma nebe Komite Konjuntu labele hakotu, lider husi Komite Konjuntu nain rua sei ható'o ba Ministru Defeza ida-idak nian atu rezolve ho dame.
3. Nune'e mos bainhira kontrovérsia ne'e labele resolve tuir parágrafu 2, Partes sira tenki resolve liu husi kanais diplomática.

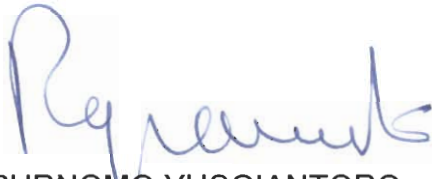
ARTIGU X ALTERASAUN, APLIKASAUN NOMOS RESIZAUN

1. Akordu ida ne'e sei hahu tama iha vigor iha loron simu notifikasaun ba dalarua nian ne'ebé Partes sira sei komunika ba malu oficialmente bainhira remata tiha prosesu ratifikasaun sira nomos sei válidu nafatin ba período tinan Lima (5). Eseptu hakotu husi Parte ida tuir parágrafu 3 husi artigu ida ne'e, nune'e bele konsidera hanesan prorogadu tiha ona ba tinan Lima (5) tuir mai. Bele mos halo altera iha loron ruma bainhira hetan tiha akordu ho hakerek husi Partes sira.
2. Nune'e mos bele dada fali iha loron ruma ho Partes ida no fo avizu dala-uluk lai iha loron Atus Ida Ualu Nolu (180).
3. Ressisaun ida ne'e sei la feita ba validade ou durasaun ba kontratu sira nebe sei hala'o hela iha âmbito Akordu ida ne'e nian.

HO SINSERIDADE, Representante hirak ne'e, hodi sira nia Autoridade Guvernu nian, asina tiha ona Akordu ida ne'e.

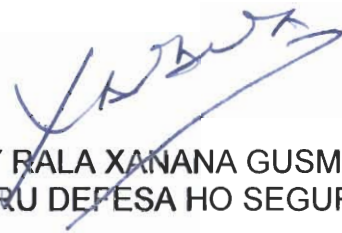
Hala'o iha.....¹⁹.....iha loron.....²⁰¹¹.....iha
exemplares orijinais rua, ida-idak iha lingua Indonésio, Tétum, Potugûes no
Inglês, nebe textu hotu-hotu iha forsa legal hanesan. Karik iha diferença ba
interpretasaun, sei aplika textu ho lian Inglês.

HODI REPÚBLIKA INDONÉZIA
NIA NARAN



PURNOMO YUSGANTORO
MINISTRU DEFESA

HODI REPÚBLIKA DEMOKRÁTICA
TIMOR-LESTE NIA NARAN



KAY RALA XANANA GUSMAO
MINISTRU DEFESA HO SEGURANSA



REPUBLIK INDONESIA

**ACORDO
ENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA INDONÉSIA
E
O GOVERNO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR- LESTE
SOBRE
ACTIVIDADES DE COOPERAÇÃO NA ÁREA DA DEFESA**

O Governo da República da Indonésia e o Governo da República Democrática de Timor-Leste a seguir denominados por Parte ou Partes;

Visando o desenvolvimento das relações de amizade entre os dois países;

Considerando o mútuo interesse em promover a cooperação na área da defesa;

Reconhecendo que a estreita cooperação nessa área beneficiará ambas as Partes;

No intuito de melhorar e ampliar a relação bilateral existente entre os dois países, através da cooperação na área da defesa, baseada nos princípios da **igualdade**, benefício mutuo e no pleno respeito da soberania e integridade territorial;

De acordo com as leis e regulamentos vigentes nos respectivos países,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I OBJETIVO

O objectivo deste Acordo é promover as relações bilaterais no domínio da defesa para fins pacíficos, em conformidade com as respectivas legislações nacionais, com a Carta das Nações Unidas e outras normas universalmente reconhecidas do direito internacional.

ARTIGO II ÂMBITO DE COOPERAÇÃO

A cooperação na área da defesa, objecto deste Acordo, pode revestir as seguintes formas:

1. Diálogo bilateral regular e consultas sobre questões estratégicas militares e de defesa, de interesse comum.
2. Troca de informações na área da defesa e outros.
3. Promoção da cooperação entre as forças armadas.
4. Cooperação em aspectos de suporte logístico.
5. Outras áreas de cooperação, mutuamente acordadas pelas partes.

ARTIGO III REGIME DE EXECUÇÃO

As partes podem celebrar acordos de execução relativos a aspectos específicos da cooperação no âmbito do presente Acordo, se necessário.

ARTIGO IV COMITÉ CONJUNTO

1. Uma comissão constituída por representantes de ambas as Partes, doravante designada por “Comissão Conjunta” será criada para iniciar, coordenar e monitorizar as diferentes actividades desenvolvidas no âmbito do presente Acordo. A Comissão Conjunta discutirá os diversos aspectos da cooperação.
2. A Comissão Conjunta será composta por representantes de cada Parte. O encontro da Comissão Conjunta será co-presidido pelos adequados Oficiais Superiores.
3. A Comissão Conjunta pode estabelecer subcomissões para tratar assuntos específicos de interesse comum.
4. A Comissão Conjunta reunir-se-á, em princípio, uma vez a cada dois anos, alternadamente na Indonésia e em Timor-Leste. A data, local e agenda da reunião serão acordados entre os Co-presidentes da Comissão Conjunta.
5. As tarefas da Comissão Conjunta são as seguintes:
 - a) Explorar e identificar potenciais áreas de cooperação no âmbito da defesa.
 - b) Propor e discutir aspectos de interesse comum.
 - c) Iniciar e organizar actividades de cooperação.
 - d) Monitorizar e rever as actividades iniciadas no âmbito do Acordo.
 - e) Recomendar acordos de execução, se e quando necessários.

- f) Avaliar e propor eventuais alterações ao presente Acordo.

ARTIGO V DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

As questões de protecção dos direitos de propriedade intelectual, a sua propriedade e uso legal, criados ou transferidos em virtude deste Acordo, incluindo os direitos legítimos de terceiros, são regulados por acordos específicos celebrados por entidades das partes em áreas específicas da cooperação.

ARTIGO VI ATRIBUIÇÕES ORÇAMENTAIS

Cada Parte suportará as suas próprias despesas durante a execução do presente Acordo, em conformidade com as suas dotações orçamentais.

ARTIGO VII JURISDIÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

1. As autoridades de cada Parte terão o direito de exercer jurisdição sobre o pessoal militar e/ou componente civil no que diz respeito às infracções cometidas no território das respectivas Partes.
2. As Partes renunciam a toda e qualquer reivindicação, com excepção dos litígios contratuais, contra a outra, por perdas, danos ou destruição de bens pertencentes às suas Forças Armadas ou de ferimento ou morte do seu pessoal militar e/ou componente civil decorrentes do exercício das suas funções oficiais autorizadas por este Acordo.

3. Quaisquer reclamações de terceiros, decorrentes de actos ou omissões de militares e civis, oficialmente relacionadas com o Governo de cada Parte serão resolvidos em conformidade com as leis e regulamentos da Parte respectiva.

ARTIGO VIII CONFIDENCIALIDADE

1. Durante a vigência do presente Acordo entre as Partes, aplicar-se-ão as seguintes regras:
- a) As Partes comprometem-se a proteger a informação classificada a que possam ter acesso no âmbito do presente Acordo, com respeito pelas suas normas internas.
- b) Equipamento e informação classificada apenas poderão ser facultados pelas vias oficiais ou por vias que venham a ser acordadas pelas entidades de segurança competentes. Todo o equipamento e informação, no âmbito do presente Acordo, são classificadas de acordo com os seguintes níveis de segurança:

INDONÉSIO	PORTUGUÊS	INGLÊS	TÉTUM
Sangat Rahasia	Muito Secreto	Top Secret	Sekretu Liu
Rahasia	Secreto	Secret	Sekretu
Konfidensial	Confidencial	Confidential	Konfidensial
Terbatas	Reservado	Restricted	Rezervadu
Biasa	Não Classificado	Unclassified	Laos Klasificadu

- c) Todas as informações recebidas no âmbito do presente Acordo não poderão ser transferidas, divulgadas ou transmitidas, directa ou indirectamente, com carácter temporário ou permanente, a terceiros,

peessoas ou entidades, sem o prévio consentimento escrito da Parte de origem.

ARTIGO IX RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

1. Qualquer litígio resultante da interpretação, aplicação ou implementação do presente Acordo será, em primeira instância, submetido ao Comité Conjunto para resolução amigável.
2. Caso o litígio não possa ser resolvido a este nível, os co-presidentes do Comité Conjunto devem remete-lo para os respectivos Ministros de Defesa, que deverão procurar uma resolução amigável.
3. Caso o litígio não possa ser resolvido a este nível, deverá ser encontrada uma solução através das vias diplomáticas.

ARTIGO X ENTRADA EM VIGOR, ALTERAÇÕES E TERMO

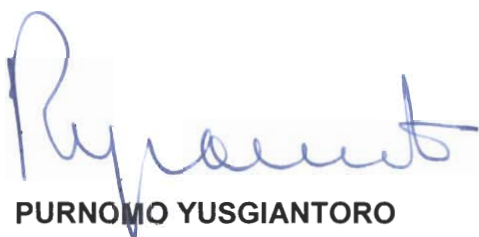
1. O Acordo entra em vigor na data da recepção da segunda notificação através da qual as Partes comunicam oficialmente, à outra, o cumprimento dos respectivos procedimentos internos e permanecerá válido por um período de 5 anos.
2. O Acordo pode ser alterado a qualquer momento com o consentimento escrito de ambas as partes.

3. O presente Acordo pode ser denunciado por qualquer das Partes, mediante notificação escrita à outra, com 180 dias de antecedência sobre a data em que pretende pôr-lhe termo.
4. A denúncia do presente Acordo não afecta a validade ou a duração dos contratos em curso, concluídos na sua vigência.

EM FÉ DO QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram este Acordo.

Feito em Díli neste dia 19 de Agosto de 2011, em dois originais, nos idiomas Indonésio, Português, Tétum e Inglês, todos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, o inglês prevalecerá.

**PELO GOVERNO DA
REPÚBLICA DA INDONÉSIA**



**PURNOMO YUSGiantoro
MINISTRO DA DEFESA**

**PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE**



**KAY RALA XANANA GUSMÃO
MINISTRO DA DEFESA E SEGURANÇA**



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE

CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste hereinafter referred to as the "Party" or "Parties";

Aiming at development of friendly relations between the two Countries;

Considering their common interest in promoting cooperation in the field of defence;

Recognizing that closer cooperation in these fields will be beneficial to both Parties;

Desiring to enhance and expand the existing bilateral relationship through defence-cooperation between both countries based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of the right of sovereignty and territorial integrity;

Pursuant to the prevailing laws and regulation in the respective countries.

Have agreed as follows:

19/8

19/8/11

ARTICLE I PURPOSE

The purpose of the Agreement is to promote bilateral cooperation in the field of defence in compliance with the respective national laws and regulations for peaceful purposes as enshrined in the United Nations Charter and other universally recognized norms of international laws.

ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION

Cooperation in the field of defence covered by the Agreement, may include the following forms:

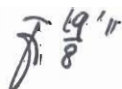
1. Regular bilateral dialog and consultation on strategic defence and military issues of common interest.
2. Exchange of information on defence establishment and matters.
3. Promoting cooperation of the Armed Forces.
4. Cooperation on logistics supports.
5. Other areas of cooperation as mutually agreed upon by both Parties.

ARTICLE III IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

The Parties shall conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of this cooperation, if required.

ARTICLE IV JOINT COMMITTEE

1. An Indonesian-RDTL defence Joint Committee hereinafter referred to as the "Joint Committee" shall be formed for the purpose of initiating, coordinating and monitoring the different activities carried out in the framework of the Agreement. The Joint Committee shall discuss the various issues of this cooperation.



2. The Joint Committee will be composed of official representatives from each Party. The meeting of the Joint Committee shall be co-chaired by the appropriate senior defence officials from the Parties.
3. The Joint Committee may establish sub-committees to effectively address specific projects of mutual interest.
4. The Joint Committee will meet in principle, once in two years, alternately in Indonesia and Timor-Leste. The date, site and agenda will be agreed upon between the Co-Chairs.
5. The tasks of the Joint Committee will be:
 - a) To identify potential areas of cooperation in the field of defence;
 - b) To propose and discuss items of common interest;
 - c) To initiate and organize the cooperation activities;
 - d) To monitor and review the different activities initiated in the framework of the Agreement;
 - e) To recommend implementing arrangements, if and when required;
 - f) To propose and take into consideration possible amendments to this Agreement.

ARTICLE V PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The issues of protection of intellectual property rights including its ownership, legal use (which are being transferred or created in accordance with this Agreement), and protection of third Parties' legitimate rights shall be regulated by separate arrangements concluded by organisations of the Parties on specific areas of cooperation.

ARTICLE VI BUDGETARY ALLOCATIONS

Each Party shall bear its own respective expenses during the implementation of the present Agreement in accordance with its budgetary allocations.

[Signature]
19/8

[Signature]
19/8

ARTICLE VII JURISDICTION AND CLAIMS

1. The authorities of each Party shall have the right to exercise its jurisdiction over visiting military personnel and/or civilian component with respect to offences committed within the territories of the respective Parties.
2. The Parties shall waive any and all claims, other than contractual claims, against each other for damage, loss or destruction of property belonging to their Armed Forces or injury or death to their visiting military personnel and/or civilian personnel arising out of the performance of their official duties.
3. Any claims by a third Party arising out of their acts or omissions by any military personnel and related civilian personnel of the Government of each Party shall be settled in accordance with respective Parties' laws and regulations.

ARTICLE VIII CONFIDENTIALITY

During the implementation of this Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Democratic Republic of Timor-Leste, the following rules will apply:

1. The Parties commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of the present Agreement in accordance with their national laws and regulations.
2. Classified information and equipment shall only be provided through official channels or by channels agreed upon by designated security agencies of the Parties. These information and equipment are labeled with the indication of their classification level and State of origin as follows:

INDONESIAN	TETUM	ENGLISH	PORTUGUESE
Sangat rahasia	Sekretu Liu	Top secret	Muito Secreto
Rahasia	Sekretu	Secret	Secreto
Konfidensial	Konfidensial	Confidential	Confidencial
Terbatas	Rezervadu	Restricted	Reservado
Biasa	La'os Klasifikadu	Unclassified	Não Classificado

Handwritten signature

Handwritten signature

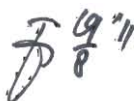
3. All information received in the framework of the present Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third Parties or unauthorized persons and entities without the prior written consent of the originating Party.

ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any matter arising from this Agreement with respect to its interpretation, application or implementation shall, in the first instance, be submitted to the Joint Committee for amicable settlement.
2. In the event that dispute is not settled at Joint Committee level, both Co-Chairs of the Joint Committee shall bring the matter to their respective Ministers of Defence for amicable settlement.
3. In the event that the dispute is not settled under paragraph 2, it shall be settled by the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE X ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS AND TERMINATION

1. The Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the second notification with which the Parties will communicate officially the fulfillment of their respective ratification procedures and remain in force for a period of five (5) years. Unless terminated by either Party in accordance with paragraph 3 of this article, it shall be deemed to have been extended for a further period of five (5) years.
2. It can be amended at any time by mutual written agreement between the Parties.
3. It can be denounced at any time by either Party by giving a prior notification of one hundred and eighty (180) days.
4. Its termination shall not affect the validity or duration of any ongoing contracts concluded within its framework.



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective government, have signed the present Agreement.

Done at Dili on 19th August 2011 in two originals, in Indonesian, Tetum, Portuguese and English languages, all texts are equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**



**PURNOMO YUSGIANTORO
MINISTER OF DEFENCE**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF
TIMOR-LESTE**



**KAY RALA XANANA GUSMÃO
MINISTER OF DEFENCE AND SECURITY**

